

Program Pertahanan dalam Mendorong Perekonomian Nasional Studi Kasus Pembangunan Jalan Trans Papua

Posma Sariguna Johnson Kennedy

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
posmahutasoit@gmail.com

Abstrak

Wilayah Indonesia bagian Timur merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan tersebut secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di Indonesia bagian Timur yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Menurut ekonomi pertahanan, dampak penggunaan anggaran pertahanan terhadap perekonomian dapat ditinjau dari pendekatan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi. Dari sisi konsumsi, pertahanan dapat melindungi sumber daya nasional terhadap berbagai ancaman, sehingga konsumsi nasional menjadi stabil bahkan meningkat. Sebaliknya, dalam paper ini ingin melihat program pertahanan dari sisi produksi. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian pustaka, tulisan ini bertujuan melihat pembangunan infrastruktur di Papua yang dilakukan oleh TNI. Pembangunan 4325 km jalan Trans Papua yang tertutup hutan dan ancaman keamanan menjadi kendala utama. Satuan Zeni yang sudah terlatih dapat melaksanakannya dengan baik, dimana tidak mampu dilakukan oleh instansi sipil. Selain untuk mengeliminir ancaman, program-program pertahanan harus dapat juga memberikan *multiplier effect* kepada kesejahteraan masyarakat, seperti yang telah dilakukan TNI dalam membantu pembangunan infrastruktur di Papua. Ini menunjukkan sebuah contoh bahwa program pertahanan yang produktif dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan di daerah, dimana swasta tidak dapat/berani masuk karena berbagai kendala di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Ekonomi Pertahanan, Program Pertahanan, Produksi, Trans Papua

Abstract

The eastern part of Indonesia is one of the strategic areas in which the area is nationally concerned with the livelihood of the people, whether in terms of political, economic, social, cultural, environmental, and defense interests. Viewed from the point of view of regional development, there are still many areas in eastern Indonesia whose development is slow with low accessibility and is dominated by disadvantaged areas with limited social and economic facilities and infrastructure. According to the defense economy, the impact of the use of defense budgets on the economy can be seen from the approach of demand or consumption and supply or production. In terms of consumption, defense can protect national resources against various threats, so that national consumption becomes stable and even increases. Instead, in this paper would like to see the defense program from the production side. By using qualitative methods through literature review, this paper aims

to see infrastructure development in Papua conducted by the TNI. The construction of 4325 km of forest-covered Trans Papua roads and security threats is a major obstacle. Trained Zeni units can perform well, which can not be done by civilian agencies. In addition to eliminating threats, defense programs must also provide a multiplier effect to the welfare of the community, as has been done by the TNI in assisting infrastructure development in Papua. This shows an example that productive defense programs can encourage regional economies and welfare, where the private sector can not / dare to enter due to various constraints in the region.

Keywords: Defense Economy, Defense Program, Production, Trans Papua

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan yang menyatakan bahwa “Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa: (1) negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, menjaga kedaulatan NKRI, baik wilayah darat, laut, dan udara termasuk warga negara, batas-batas maritim, pulau-pulau dan sumber daya alamnya adalah suatu hal yang mutlak dilakukan.

Wilayah Indonesia bagian Timur merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan tersebut secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari sudut kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan. Ditinjau dari sudut pandang pembangunan wilayah, masih banyak wilayah di Indonesia bagian Timur yang perkembangannya lambat dengan aksesibilitas rendah dan didominasi oleh daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih

sangat terbatas. Wilayah-wilayah tersebut pada umumnya kurang tersentuh oleh dinamika pembangunan sehingga kondisi masyarakat pada umumnya berada dalam kemiskinan, bahkan pada beberapa wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga masyarakatnya cenderung berorientasi kepada negara tetangga dalam hal pelayanan sosial dan ekonomi. (BNPP, 2011)

Permasalahan yang cukup signifikan dari daerah Indonesia bagian Timur khususnya Papua adalah kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut, keterisolasian wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah, pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Keterisolasian wilayah dan ketertinggalan tingkat perkembangan wilayah diantaranya adalah kekurangan pendanaan pemerintah daerah, sulitnya membangun sistem jaringan transportasi yang dapat melayani secara baik, serta kondisi jaringan jalan masih banyak yang rusak.

Pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal, diantaranya adalah potensi perikanan laut yang kurang terkelola, potensi migas, energi dan

mineral yang belum terkelola, eksploitasi sumber daya alam yang ilegal, pengelolaan lingkungan masih menimbulkan pencemaran, dan pola pengelolaan komoditi pertanian masih bersifat tradisi dan budaya yang diwariskan. Sedangkan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, diantaranya adalah tingkat pendidikan secara riil rendah, tingkat ketrampilan masih rendah, prasarana dan sarana kebutuhan pelayanan penduduk masih sangat kurang, prasarana dan sarana dasar (air bersih, listrik, telepon dan lain-lain).

Karena itu, pendekatan yang harus dilakukan dalam menyusun kebijakan dan strategi pengembangan kawasan Indonesia bagian Timur khususnya Papua dalam keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah: a) Pendekatan Kesejahteraan; dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengembangan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b) Pendekatan Lingkungan; yaitu pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan meminimasi dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan; dan c) Pendekatan Keamanan, yaitu pendekatan yang memandang perlunya pengawasan terhadap keamanan wilayah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus mengedepankan fungsi "*security*" dan fungsi "*prosperity*" dengan memperhatikan realitas perkembangan kondisi lingkungan hidup di daerah melalui kajian dan observasi lapangan yang terukur.

Salah satu program utama pemerintah adalah percepatan pembangunan wilayah Papua, terutama dengan pembanguan infrastruktur utama,

yaitu membuka jalan trans Papua. Pembangunan jalan trans Papua 4.325 km bukanlah mudah, karena sebagian besar jalan masih terputus dan tertutup hutan. Selain ancaman keamanan pun menjadi kendala, yang tidak mungkin dihadapi oleh swasta/sipil. Untuk itu perlu bantuan TNI untuk bisa membuka jalan yang telah direncanakan dan memperkecil gangguan keamanan.

Penelitian ini akan menjelaskan kebijakan pemerintah untuk pertahanan nasional yang positif terhadap perekonomian khususnya di daerah Papua. Penelitian ini termasuk dalam kajian ekonomi pertahanan yang merupakan ilmu yang mempelajari pilihan program-program pertahanan yang dapat memberikan dampak (*multiplier effect*) terhadap perekonomian. Paper tidak dalam pandangan membahas tentang operasi militer di Papua, tetapi berupa program pertahanan yang dapat membantu meningkatkan potensi produksi dari perekonomian masyarakat daerah. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan untuk pembangunan pertahanan dan perekonomian di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah kajian pustaka dengan melihat teori-teori yang mendukung peran program pertahanan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan penerapannya dalam pembangunan infrastruktur jalan di Papua.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Dipercaya terdapat hubungan antara pengeluaran pertahanan dengan perekonomian. Menurut kenyataannya,

terdapat efek yang bervariasi pada setiap negara ketika anggaran pertahanan berhadapan dengan perekonomian. Namun dari penelitian-penelitian para ekonom, masih tidak terdapat pendapat yang meyakinkan dari uji empiris yang telah dilakukan. Sebagai contoh, Kennedy (2016) menguji apakah anggaran pertahanan nasional dapat merangsang investasi, ternyata hasil empiris menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia masih memberikan efek *crowding out* terhadap investasi, dimana masih banyak pendapat yang lain dari penelitian-penelitian yang berbeda.

Saluran yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi adalah melalui kebijakan fiskal. Negara dapat berperan melalui pendanaan investasi secara langsung melalui penyediaan pelayanan publik secara efisien sehingga mendorong kegiatan perekonomian, serta merangsang adanya investasi jangka panjang. Pengeluaran pertahanan, salah satu kebijakan pemerintah, dikehendaki berpengaruh positif terhadap perekonomian. Brasoveanu (2010) menjelaskan bentuk saluran atau *channel* dalam perekonomian yang dipengaruhi oleh pengeluaran pertahanan. Saluran-saluran tersebut diantaranya adalah :

a. Penelitian dan pengembangan pada sektor pertahanan. Penelitian dan pengembangan pada sektor pertahanan dapat memberikan pengaruh positif melalui eksternalitas pada sektor perekonomian dari swasta. Penelitian militer dan pengeluaran pertahanan dapat merangsang inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Pada negara-negara berkembang pertahanan dapat membantu dalam pembentukan

struktur sosio-ekonomi yang mendukung pertumbuhan dengan terlibat dalam penelitian dan pengembangan, penyediaan tenaga-tenaga terlatih, pelatihan dan pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi.

b. Keamanan (*security*). Pengeluaran pertahanan dapat menggerakkan perekonomian karena menyediakan keamanan untuk menjaga kestabilan dalam lingkungan bisnis dan menjaga kondisi yang nyaman untuk menarik investor asing. Adanya keamanan juga menjaga penghormatan hak-hak milik dan dinamisasi pasar sehingga mendorong pertumbuhan dalam sistem global saat ini. Dengan disadari bahwa pengeluaran pertahanan meningkatkan keamanan, maka pertahanan akan menstimulasi pertumbuhan.

c. Permintaan. Pengaruh positif pengeluaran pertahanan dapat terjadi melalui peningkatan permintaan agregat (*Keynesian effect*). Peningkatan permintaan berperan penting dalam meningkatkan kegunaan (*utilization*) dari modal-modal yang belum terpakai (*idle capital*), mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan keuntungan sehingga mendorong investasi yang lebih tinggi, dimana semuanya itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pertahanan disadari juga sebagai alat kebijakan fiskal sehingga meningkatkan stimulasi permintaan atau menurunkan hambatan permintaan. Pengaruh ini tergantung dari efek pengganda yang terjadi (*multiplier effect*), jika diasumsikan tidak terdapat hubungan timbal balik

- antara peningkatan pajak dengan pembiayaan untuk pengeluaran pemerintah, dan tidak terjadi efek *crowding out* akibat pengeluaran ini.
- d. Tenaga kerja. Pengeluaran pertahanan dapat saja meningkatkan keahlian dari sebagian populasi melalui pelatihan dan pendidikan untuk para anggota militer. Sehingga memberikan efek stimulasi pada pertumbuhan jika dapat menggerakkan perekonomian menuju *full employment*, pembentukan sumber daya manusia, menjaga stabilitas, dan menyediakan infrastruktur.
- e. Investasi. Pengeluaran modal dapat memberikan kegunaan yang produktif, seperti kegunaan untuk sektor swasta dari jaringan transportasi yang pada awalnya dibangun untuk keperluan militer. Investasi pada sektor pertahanan menggerakkan eksternalitas positif kepada sektor swasta, seperti pembangunan infrastruktur publik, *spillover* dari teknologi, dan formasi sumber daya manusia.
- f. Efek *crowding out*. Pengeluaran militer dapat memberikan efek merugikan pada pertumbuhan ekonomi dengan adanya *crowding out* dengan sektor swasta. Pengeluaran pertahanan yang besar membentuk distorsi pada alokasi sumber daya dan pemisahan sumber-sumber daya dari aktivitas-aktivitas yang produktif karena adanya akumulasi persenjataan dan peningkatan kekuatan militer. Pengeluaran militer dapat saja merugikan karena berdampak pada investasi, tabungan, sumber daya manusia, dan program-program infrastruktur. Perluasan dan bentuk *crowding out* dari peningkatan pengeluaran pertahanan akan bergantung pada kegunaannya dan bagaimana pembiayaannya.
- g. *Opportunity cost*. Untuk menjelaskan hubungan negatif antara pengeluaran militer dan pertumbuhan, perekonomian fokus pada *opportunity cost* dari pengeluaran pertahanan. Pengeluaran militer dapat merintang pembangunan ekonomi dengan mengurangi tabungan dan alokasi sumber-sumber daya yang tidak pada tempatnya menjauhi penggunaan yang lebih produktif dari sektor publik ataupun sektor swasta. Dalam konteks yang sama, penelitian dan pengembangan pada sektor pertahanan dapat memisahkan penelitian dan pengembangan dari sektor swasta. Pengeluaran pemerintah untuk pertahanan nasional menyimpan potensi *opportunity cost*, karena memungkinkan untuk memperendah output perekonomian dan memperlambat tingkat pertumbuhan GDP.
- h. Peningkatan pajak (*increased taxation*). Keterbatasan anggaran pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dapat saja dibiayai dengan pemotongan pengeluaran publik lainnya, peningkatan pajak, peningkatan pinjaman ataupun meningkatkan jumlah uang yang beredar. Berbagai cara pembiayaan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan akan memberikan efek lanjutan, yang dapat memukul balik perekonomian. Pengeluaran pertahanan, jika dibiayai oleh pendapatan dari faktor-faktor produksi yang produktif akan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika dibiayai oleh pendapatan dari sektor non produktif, dapat saja

memberikan pengaruh positif ataupun negatif pada pertumbuhan ekonomi, tergantung dari tingkat pengeluaran pertahanannya.

- i. Efisiensi dari alokasi sumber daya. Jika pengeluaran militer tidak dikelola melalui mekanisme pasar, akan cenderung menyebabkan distorsi pada harga-harga relatif. Implementasi kebijakan untuk mendukung program militer dapat saja mengganggu alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi.
- j. Peningkatan kekuatan politik dari militer. Pengeluaran pertahanan dapat saja bukan berasal dari kebutuhan akan keamanan, tetapi karena *rent seeking* dari industri militer yang kompleks, sehingga dapat meningkatkan persenjataan dan postur militer yang melebihi porsinya dan dapat menyebabkan perlombaan senjata atau peperangan.

Banyak dari semua efek ini terjadi sekaligus, tergantung dari tingkat kegunaannya dan eksternalitas dari pengeluaran pertahanan serta efektivitas dalam mengatasi ancaman. Melalui saluran-saluran tertentu tersebut, pengeluaran pertahanan memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan.

Melalui pendekatan dari sisi penawaran, saluran yang dapat menjelaskan pengaruh pengeluaran militer terhadap *output* perekonomian adalah melalui ketersediaan faktor-faktor produksi, baik itu tenaga kerja, modal (baik fisik maupun sumber daya manusia), serta teknologi yang secara bersama-sama mempengaruhi *output* perekonomian potensial. Teori ini mengasumsikan bahwa *real output* per kapita dan pertumbuhan

stok modal akan berada pada tingkat yang konstan dalam periode tertentu walau ada terjadi fluktuasi-fluktuasi jangka pendek. Diasumsikan pula peningkatan tenaga kerja dan modal pada tingkat *steady* akan meningkatkan pula *agregat output*-nya pada sebuah tingkat yang *steady* (Solow, 1970). Maka perubahan dari *agregat output* akan dapat dijelaskan melalui perubahan dalam modal dan tenaga kerja.

Salah satu pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian mengenai hubungan antara pengeluaran pertahanan dan pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran adalah dengan pendekatan fungsi produksi dari neoklasik. Yaitu dengan meninjau deskripsi dari sisi penawaran melalui perubahan-perubahan *agregat output*.

West & Thompson (1990) menyatakan, akibat adanya pengeluaran pertahanan maka muncul efek-efek dalam perekonomian yang berdampak pada *agreat output* dari sisi penawaran, yang dapat dijelaskan melalui teori neoklasik berikut ini :

- Jika muncul efek alokasi sumber-sumber daya (*resource-allocation effect*) yang menyebabkan investasi menjadi *crowd-out*, akan terjadi penurunan pertumbuhan *output* agregat. Model neoklasik menjelaskan bahwa tingkat pertumbuhan merupakan fungsi dari pertumbuhan modal. Jadi ketika muncul efek ini, transmisi yang terjadi akan menurunkan pertumbuhan modal dan dilanjutkan dengan menurunnya tingkat pertumbuhan *output* agregat.
- Munculnya efek mobilisasi sumber-sumber daya (*resource-mobilization effect*) akan berdampak pada turunnya tabungan dari rumah tangga. Sesuai

dengan model neoklasik, tentunya turunnya tabungan akan memperendah pergerakan tingkat pertumbuhan.

- Jika terjadi *spin-off effect* pada sektor-sektor lain dari peningkatan teknologi, maka sesuai model neoklasik, peningkatan teknologi yang terjadi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
- Terjadinya *aggregate demand effect* dengan adanya mekanisme pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian tidak dapat dijelaskan dalam teori neoklasik. Pada model ini tidak mungkin terjadi, karena sumber-sumber daya perekonomian diasumsikan *full employment*.
- Jika terjadi *debt accumulation effect*, maka produk atau jasa berteknologi tinggi yang dibeli dengan utang luar negeri tanpa melakukan transfer teknologi akan memperendah pertumbuhan teknologi. Dalam model neoklasik, rendahnya pertumbuhan ini karena akses kepada teknologi asing sangat terbatas.

Saluran yang dapat menjelaskan pengaruh pengeluaran militer terhadap *output* perekonomian melalui sisi permintaan adalah melalui level dan komposisi dari *expenditure*. Yang terjadi di sini adalah adanya efek pengganda sehingga meningkatkan permintaan (*Keynesian multiplier effect*). Peningkatan ini akan meningkatkan utilitas dan mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Benoit (1973, 1978) pengeluaran untuk militer dapat memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan, efek ini berasal dari model Keynes berdasarkan mekanisme pengganda bagi negara-negara yang *underutilized*.

West & Thompson (1990) juga menyatakan bahwa akibat adanya

pengeluaran pertahanan maka muncul efek-efek dalam perekonomian yang berdampak pada *output* agregat dari sisi permintaan, yang dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Keynes, yaitu :

- Jika muncul efek alokasi sumber-sumber daya (*resource-allocation effect*) akan menyebabkan investasi menjadi *crowd-out*. Model Keynes menjelaskan bahwa pertumbuhan melambat pada tahun-tahun selanjutnya. Misalnya jika sektor pertanian melambat di belakang sektor industri karena pengeluaran militer menekan investasi pada pertanian, tingkat pertumbuhan juga akan melambat.
- Munculnya efek mobilisasi sumber-sumber daya (*resource-mobilization effect*) akan berdampak pada turunnya tabungan dari *household*. Menurut model Keynes, rendahnya tingkat rasio tabungan menjadi sebab rendahnya pergerakan tingkat pertumbuhan.
- Jika terdapat *spin-off* yang positif dari pengeluaran militer, sesuai model Keynes, akan terjadi peningkatan pertumbuhan.
- *Aggregate demand effect* yang muncul, tentunya dapat dijelaskan oleh model Keynes berdasarkan mekanisme pengganda (*multiplier mechanism*). Efek multiplier ini statis, tetapi dapat saja berefek dinamis dalam jangka panjang.
- Jika terjadi *debt accumulation effect* akan menekan pertumbuhan modal. Dalam model Keynes, efek ini mengakibatkan pengurangan sumber-sumber daya untuk pertukaran dengan luar negeri.

Uk Heo (1996) menyimpulkan, dari berbagai efek yang ditimbulkan karena adanya pengeluaran pertahanan, secara garis besar terdapat tiga perbedaan hasil penelitian dari analisa hubungan pengeluaran pertahanan dan pertumbuhan ekonomi, yaitu yang memberikan hasil hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak memberikan hubungan sama sekali. Argumen dari kelompok-kelompok ini adalah :

- Kelompok yang mengemukakan bahwa pengeluaran pertahanan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi berargumen bahwa pengeluaran pertahanan akan memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Kelompok yang mengemukakan terdapat hubungan negatif antara pengeluaran pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi memfokuskan pada argumen dua jenis *trade-off*, yaitu efek alokasi (*the guns vs butter trade-off*), dan efek pertumbuhan (*the guns vs growth trade-off*).
- Kelompok ketiga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pengeluaran pertahanan militer dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pertahanan dapat saja memberikan efek negatif maupun positif dengan pertumbuhan pada waktu tertentu dan kondisi tertentu. Pengeluaran pertahanan dapat saja secara tidak konsisten mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara statistik dengan signifikan.

D. PEMBAHASAN

Hartley (2005) mengidentifikasi pengaruh positif dari

pengeluaran pertahanan. Pertahanan memberikan keuntungan secara langsung dari teknologi dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, dimana *spin-off*-nya digunakan oleh sektor sipil yang dapat meningkatkan pertumbuhan. Dilihat dari sisi penawaran atau produksi, di negara-negara berkembang, pengeluaran pertahanan dapat meningkatkan pertumbuhan jika beberapa bagian pengeluaran digunakan untuk penyediaan infrastruktur sosial. Salah satu yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah membantu pemerintah dalam pembangunan jalan Trans Papua sebagai upaya menghapus keterisolasian daerah saat ini. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk melancarkan distribusi serta menekan harga barang di daerah paling timur Indonesia ini.

Papua memiliki banyak permasalahan yang melekat padanya. Gambaran umum tentang Papua adalah lemahnya manajemen pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah dan/bersama pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari realitas fisik Papua yang masih terisolir dan terkotak-kotak. Perekonomian masih terutama hanya bertumpu pada jalur transportasi udara yang sangat mahal dan transportasi laut yang lamban. Jalur transportasi darat masih belum diberdayakan secara optimal.

Pemerintah pusat memberikan perhatian dan kepedulian yang sangat besar terhadap pembangunan di Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujud perhatian pemerintah, contohnya adalah dibangunnya jalan sepanjang kurang lebih 900 km di daerah terisolasi untuk membuka jalan menuju perkotaan. Dengan dibangunnya jalan poros tertentu di daerah

terisolasi ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah terpencil, terutama hasil produksi dari masyarakat yang berada di daerah terpencil akan bertambah nilai jualnya, serta memudahkan dalam pemasaran karena transportasi mudah dan lancar. Dalam pembangunan jalan poros menuju daerah terisolir, masyarakat harus ikut bersama-sama membantu dan mensukseskan pembangunannya.

Sejak 2014, pemerintah ingin Papua berubah lebih maju, sehingga perlu dipercepat perekonomiannya agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Proses mensejahterakan tersebut harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Tidak hanya untuk kepentingan infrastruktur, namun jalan yang indah ini menjadi kebanggaan masyarakat Papua. Percepatan pembangunan wilayah Papua dengan membuka jalan trans Papua menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan trans Papua sepanjang 4.325 kilometer. Pembangunan infrastruktur Trans Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, baik pertanian maupun energi yang diperlukan masyarakat di Provinsi Papua. Semuanya itu sangat sulit untuk dipasarkan, karena terbatasnya alat transportasi untuk mengantarkan hasil bumi masyarakat yang ada. Hanya terdapat transportasi udara, itupun tertentu saja dan biayanya sangat mahal.

Agar dapat menghidupkan perekonomian rakyat lebih ramai, perlu dibuka sarana transportasi darat sebesar-besarnya. Diantaranya adalah di sepanjang perbatasan mulai dari Jayapura-Merauke,

Keerom, Pegunungan Bintang dan Boven Diguei. Begitu juga dari Jayapura-Wamena atau dari Wamena-Pegunungan Bintang. Selain itu dari Jayapura-Sarmi-Nabire-Enarotali-Sorong mengelilingi wilayah Kepala Burung, kemudian di sepanjang pesisir selatan hingga kembali ke Merauke. Hal ini diharapkan dapat membuka keterisolasian daerah serta mendukung perencanaan dan mempercepat pengembangan ekonomi antar kabupaten di Papua. Dengan adanya jalan penghubung ini, arus orang dan barang dari satu kabupaten ke kabupaten lain bisa lebih cepat.

Peran TNI dalam Membangun Jalan Trans Papua¹

Pembangunan jalan trans Papua ini ternyata bukanlah perkara mudah. Sebagian besar jalan masih terputus dan tertutup hutan. Selain itu ancaman keamanan menjadi kendala. Dalam mewujudkan itu semua, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama TNI dalam hal ini Kodam XVII/Cenderawasih bekerja sama membangun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah perbatasan Papua. Pembangunan infrastruktur itu dapat membuka keterisolasian di beberapa wilayah yang ada di Papua. TNI AD diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah ini, yaitu membuka bakal jalan yang masih tertutup hutan. TNI AD mengerahkan satuan Zeni yang sudah disiapkan dan terlatih untuk membangun dan bertempur. Hal seperti ini yang tidak dimiliki instansi sipil.

1

<http://www.antarapapua.com/berita/453380/pangdam-pembangunan-jalan-transpapua-upaya-menghapus-keterisolasian>

Peran dan kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam hal membantu pembangunan dan pembebasan lahan. Kodam XVII/Cenderawasih mengerahkan personilnya serta menyiapkan alat peralatan berat untuk pelaksanaan pembuatan jalan tersebut. Tentara bersama rakyat negara kuat. Dibantu masyarakat, prajurit terjun bekerja di lapangan, sehingga pembangunannya dapat berjalan lancar dan aman. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua dilibatkan untuk mendukung pembangunan di Papua, sehingga keterisolasian daerah dapat dibuka, serta kemajuan dan kelancaran pembangunan dapat terwujud. Pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat di segala bidang. Harapan lain dari pembangunan jalan trans Papua adalah memberikan ruang bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Papua. Papua yang kaya akan sumber daya alam akan dan keeksotisan diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

TNI mendapatkan kepercayaan untuk mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadikan Zeni TNI AD sebagai mitra kerja. Zeni TNI AD membuka trans Papua yang belum terjamah oleh teknologi, selain itu para pekerja dari sipil tidak tahu ancaman-ancaman apa saja yang ada di tengah hutan. Jika kontraktor dilepas begitu saja, maka akan sulit untuk bekerja. Zeni TNI AD ikut membantu membuka jalan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga gangguan keamanan dapat diperkecil. Dengan diterjunkannya satuan Zeni TNI AD, seluruh pekerja bisa aman dan nyaman

dalam mengerjakan pekerjaan trans Papua sesuai target dari pemerintah.

Dari data yang ada, pengerjaan proyek Trans Papua beberapa kali memakan korban. Yaitu meninggalnya empat pekerja sipil yang mengerjakan proyek pembangunan jalan dari Sinak ke Mulia, Kabupaten Jayawijaya. Keempatnya ditembakole kelompok bersenjata di Desa Agenggen, Daerah Sinak, Kabupaten Puncak pada Maret 2016. Dengan adanya korban dari pihak sipil untuk pengerjaan, maka pihak satuan Zeni TNI AD menjadi terdepan sebagai pembuka jalan, yang selanjutnya diteruskan oleh Kementerian PUPR dalam pengaspalan hingga sampai tahap penyelesaian.

Satuan Zeni TNI Angkatan Darat mejadi multi fungsi, selain bertugas membuka jalan, menebang pohon, membuka hutan, juga membuat badan jalan dan membelah gunung. Sistem pengerjaan dilakukan paralel, sehingga satuan Zeni harus bekerja ekstra. Kontraktor umum di belakangnya akan langsung melakukan pengerasan dan pengaspalan jalan. Pihak kontraktor umum harus dikawal oleh TNI, jika tidak, mereka tidak bisa bebas dan aman bekerja dalam menyelesaikan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pekerjaan pembangunan jalan Trans Papua terus dipercepat seiring kian mendesaknya kebutuhan jalan nasional di Papua. Saat ini warga, terutama yang bermukim di pedalaman Papua, tidak mempunyai akses jalan dan hanya mengandalkan transportasi angkutan udara yang sangat mahal sehingga tidak semua kalangan bisa menjangkaunya.

Semenjak tahun 2016, TNI dilibatkan bertujuan untuk percepatan pembangunan Trans Papua,

dimana tidak sembarang orang/sipil dapat membangun jalan di Papua. Tim Zeni bekerja mengikis pinggang dan punggung pegunungan Jayawijaya yang melintang membelah Kabupaten Nduga dan Jayawijaya. Menaklukkan pegunungan Papua untuk membangun ruas jalan bukanlah hal yang mudah. Tidak jarang harus menggunakan bahan peledak untuk menghancurkan batu yang menghalangi pembangunan jalan. Prajurit Zeni TNI AD harus bekerja keras untuk mengatasinya. Medan berbatu, cuaca ekstrem hingga ancaman longsor dan gangguan keamanan menjadi hal yang dihadapi sehari-hari. Nilai-nilai perjuangan yang tinggi diterapkan demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, pun menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi berbagai halang rintangan yang ada.

Total kekuatan yang dikerahkan oleh jajaran Zeni TNI Angkatan Darat adalah sejumlah 394 orang personel dengan komposisi: POP-1 meliputi Denzipur-10 dan Denzipur-12, mengerjakan ruas jalan Wamena-Habema dan Habema-Mbua; POP-2 yaitu Yonzipur-18, mengerjakan ruas jalan Mbua-Mugi dan Mugi-Paro; sedangkan POP-3 dari Yonzikon-14 mengerjakan ruas jalan Paro-Kenyam dan Kenyam-Mamugu, dengan kekuatan tiap POP berjumlah 107 personel. Alat-alat berat yang dibutuhkan dalam pembuatan ruas jalan terdiri dari Exavator, Dozer, Grader, Dump Truck, Tandem Roller, Tyred Roller, Vibro dan Tangki Air, dengan kebutuhan pembukaan jalan berjumlah 78 unit dan pengaspalan jalan berjumlah 60 unit alat berat. Berikut tabel rincian alokasi dana dan 14 ruas jalan Trans Papua yang dikerjakan :

Tabel 1. Rincian Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua

No.	Pembangunan Ruas Jalan	Alokasi Dana (Rp)
1.	Kasonaweja-Trimuris-Sarmi	25 miliar
2.	Lagasari-Wapoga-Sumiangga	35 miliar
3.	Botawa-Wapoga	20 miliar
4.	Windesi-Yaur-Kwatisore	35 miliar
5.	Gesa-Barapaso-Batas Waropen	30 miliar
6.	Oksibil-Kawor-Waropko	53 miliar
7.	Rosbori-Manggui-Poom (Lingkar Yapen)	20 miliar
8.	Dawai-Waindu	20 miliar
9.	Saubeba-Rosbon	20 miliar
10.	Kenyam-Gearek	40 miliar
11.	Gearek-Pasir Putih-Suru-suru	40 miliar
12.	Suru-suru-Obio-Dekai	40 miliar
13.	Mamugu-Batas Batu	40 miliar
14.	Lingkar Marsinam	17 miliar

Sumber: <http://tni.mil.id/view-114827-tni-bangun-trans-papua-sepanjang-4325-km.html>

Pendekatan TNI AD²

Pasca penembakan pekerja Jalan Trans Papua di Sinak, Kabupaten Puncak, pihak perusahaan swasta meminta TNI agar dapat membantu pekerjaan trans Papua. Para pekerja tidak mau bekerja karena terancam nyawanya akibat ulah dari sipil bersenjata yang selalu mendatangi para pekerja. Pemerintah meminta TNI agar bisa membantu bersama-sama mengerjakan trans Papua, selain ikut mengerjakan pekerjaan jalan juga berfungsi mengamankan para pekerja proyek jalan. TNI menjadi garda terdepan dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan Trans Papua. Selain medannya yang masih hutan, konflik yang ada di bumi Cendrawasih membuat TNI harus turun tangan. Jika tidak Trans Papua tidak akan selesai sesuai yang direncanakan.

Langkah awal TNI membantu membuat trans Papua adalah melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat agar proaktif untuk ikut mendukung pembuatan jalan. TNI mencatat apa kebutuhan masyarakat, setelah itu melalui program pendekatan teritorial kemudian membangun sejumlah hunian/rumah bagi masyarakat di Sinak dan sekitarnya, termasuk membagikan 300 sepatu kepada anak-anak usia sekolah. Setelah TNI turun ke masyarakat, TNI mengajak masyarakat Sinak untuk ikut menjaga keamanan para pekerja pembangunan jalan. Dengan demikian para pekerja dari perusahaan mau lagi menyelesaikan pekerjaannya.

Program pendekatan secara teritorial juga mendapat perhatian dari pihak yang berseberangan dengan pemerintah, membuat 150 warga langsung menyatakan diri turun gunung dan

kembali ke pangkuan NKRI. Ini merupakan peristiwa sejarah yang luar biasa, TNI mampu meredam masyarakat dan sekaligus menyadarkan pengikut Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebanyak 150 orang. Sejak peristiwa penembakan terhadap pekerja perusahaan, Sinak menjadi aman dan masyarakatnya mendukung pembuatan jalan untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat Sinak khususnya, dan umumnya adalah masyarakat Papua.

Masyarakat di pedalaman Papua sebenarnya menginginkan adanya pembangunan di segala bidang, terutama infrastruktur jalan dan rumah tinggal. Ketika pihak TNI melakukan pendekatan teritorial yang dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan hunian/rumah tinggal untuk masyarakat, masyarakat sendiri yang ramai-ramai menjaga pembangunan jalan. Ini merupakan contoh kongrit bahwa masyarakat Papua ingin diperhatikan. Karena mereka miskin, disadari apabila semua infrastuktur sudah dibuat, lambat laun ekonomi masyarakat Papua akan meningkat.

Selama ini masyarakat Papua hanya bisa bertahan hidup untuk keluarga kecilnya saja, sementara sarana dan prasarana tidak ada yang bisa mengubah pola hidup mereka di lingkungan. Sekarang lingkungan yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah pertanian, bagaimana cara bercocok tanam yang baik, dan bagaimana pemasarannya. Mereka sendirilah yang nanti akan melakukan perubahan, baik secara ekonomis maupun budaya setelah infrastuktur ada, baik itu jalan, pasar atau tempat pertemuan untuk transaksi.

Permasalahan infrastruktur yang terbatas inilah yang sebenarnya membuat

² <http://tni.mil.id/view-114827-tni-bangun-trans-papua-sepanjang-4325-km.html>

masyarakat Papua sulit berkembang. Saatnya pemerintah memfasilitasi masyarakat Papua untuk mandiri dan berkembang agar tidak ada jurang pemisah antara masyarakat Indonesia yang ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Papua. Diyakini jika itu terjadi, orang yang tadinya berseberangan akan berbalik 180 derajat dan mendukung pemerintah, seperti 150 orang masyarakat Sinak kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. KESIMPULAN

Pertahanan dan perekonomian merupakan dua variabel berpengaruh yang saling timbal balik. Tanpa pertahanan maka akan muncul ancaman atau gangguan-gangguan sehingga perekonomian tidak dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya pertahanan hanya dapat ditingkatkan jika pendapatan nasional juga meningkat.

Selain untuk mengeliminir ancaman, program-program pertahanan harus dapat juga memberikan *multiplier effect* kepada kesejahteraan masyarakat, seperti yang telah dilakukan TNI dalam membantu pembangunan infrastruktur di Papua. Ini menunjukkan sebuah contoh bahwa program pertahanan yang produktif dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan di daerah, dimana swasta tidak dapat/berani masuk karena berbagai kendala di wilayah tersebut.

Referensi :

- Benoit, E. (1973). *Defence and Economic Growth in Developing Countries*. Lexington.
- Benoit, E. (1978). *Growth and Defence in Developing Countries*, *Economic*

Dari temuan-temuan dapat disimpulkan bahwa program-program pertahanan nasional, secara keseluruhan dapat meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber daya domestik, seperti program pembangunan jalan Trans Papua. Sektor militer juga mampu mengawal dan menjamin Bergeraknya perekonomian dengan aman, walaupun struktur ekonomi, sosial dan politik nasional sangat bervariasi dan berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Tantangan ke depan bagi pertahanan Indonesia adalah perlunya peningkatan anggaran pertahanan, karena permasalahan pertahanan akan semakin kompleks. Selain diakibatkan sumber daya alam yang sangat terbatas sehingga menyebabkan potensi konflik ke depan, juga tuntutan dari masyarakat bahwa anggaran tersebut melalui program-program pertahanan harus dapat juga memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, perlu ditinjau pengaruh pertahanan dan peran TNI terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan, terpencil dan terdepan secara lebih mendalam, karena merupakan wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Development and Cultural Change. Vol.26 (2) : 271-280.

- BNPP, 2011, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara & Kawasan Perbatasan Tahun 2011- 2014

Brasoveanu, Laura Obreja. (2010). The Impact of Defense Expenditure on Economic Growth”, *Romanian Journal of Economic Foecasting* – 4/2010.

Hartley, Keith. (2005). Defence Spending and Its Impact on the National Economy: A Review of the Literature and Research Issue, *Centre for Defence Economics*, University of York, online-version.

Heo, Uk. (1996) The Political Economy of Defense Spending in South Korea. *Journal of Peace Reasearch*, Vol. 33 (4) : 483-490.

Kennedy, Posma Sariguna Johnson. (2016). The Relations of Defense Budget with Investment: Evidence from Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues* , 6(S6), 115-119.

Solow, Robert M. (1957) “A Technical Change and the Aggregate Production Function”, *Review of Economics and Statistics*, Vol.39 (3), pp. 312-320.

West, Robert & Thompson, Scott. (1990). Impact of Military Expenditures on Economic Development, Interim Synthesis Report Submitted to the Agency for International Development by the *Fletcher School of Law and Diplomacy*, Tufts University.

<http://tni.mil.id/view-114827-tni-bangun-trans-papua-sepanjang-4325-km.html>

<http://www.antarapapua.com/berita/453380/pangdam-pembangunan-jalan-transpapua-upaya-menghapus-keterisolasian>

Sumber Website Lainnya

<http://militermeter.com/tni-dan-kementerian-pupr-bangun-jalan-trans-papua-4-300-km/>

<https://nasional.sindonews.com/read/1204132/15/jokowi-dan-panglima-tni-ngetrail-bareng-di-jalan-trans-papua-1494410125>

<http://newsmetropol.com/tni-dan-kementerian-pupr-bangun-jalan-trans-papua-4-300-km/>

<http://properti.kompas.com/read/2017/02/14/120000921/tni.dilibatkan.membangun.jalan.trans-papua>

<http://regional.liputan6.com/read/2922641/tni-bakal-garap-titik-tersulit-pembangunan-jalan-trans-papua>

<http://setkab.go.id/kendarai-trail-tinjau-jalan-trans-papua-presiden-jokowi-puji-duet-kementerian-pupr-tni/>

<http://tni.mil.id/view-113013-tni-dan-kementerian-pupr-bangun-jalan-trans-papua-4300-km.html>

<https://www.antaranews.com/berita/624405/tni-kerjakan-jalan-trans-papua-tersulit>

<https://www.youtube.com/watch?v=7x-s0DXUMiY>